



**STUDI KOMPARASI TENTANG MEKANISME PEMBERHENTIAN  
SEMENTARA KEPALA DAERAH BERDASARKAN  
UU.NO. 22 TAHUN 1999 DAN UU.NO. 32 TAHUN 2004**  
(COMPARATION STUDIES ABOUT TEMPORARY DISMISSAL OF REGENT  
MACANISM BASED ON ARTICLE OF LAW NO. 22 OF 1999 AND ARTICLE OF  
LAW NO. 32 TAHUN OF 2004)

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**MUH.HAKIM YUNIZAR DIHARIMURTI**

**Nim: 980710101022**

**DEPERTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2006**

**STUDI KOMPARASI TENTANG MEKANISME PEMBERHENTIAN  
SEMENTARA KEPALA DAERAH BERDASARKAN  
UU.NO. 22 TAHUN 1999 DAN UU.NO. 32 TAHUN 2004**  
(COMPARATION STUDIES ABOUT TEMPORARY DISMISSAL OF REGENT  
MACANISM BASED ON ARTICLE OF LAW NO. 22 OF 1999 AND ARTICLE OF  
LAW NO. 32 TAHUN OF 2004)

**SKRIPSI**

Oleh:

**MUH.HAKIM YUNIZAR DIHARIMURTI**

**Nim: 980710101022**

**Pembimbing:**

**JAYUS, S.H.M.HUM**

**NIP: 131 287 088**

**Pembantu Pembimbing:**

**IWAN RACHMAD, S.H.M.HUM**

**NIP : 132 206014**

## MOTTO

**“AKU BERPIKIR MAKA AKU ADA”**

*(Rene Descartes)*

Russell, Bertrand, *The Problem Of Philosophy*, Ikon Teralitara, Yogyakarta, 2002 Hal.17.

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Ibunda Endang S dan Ayahanda Hari Santoso tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;

**PERSETUJUAN**

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PENGUJI

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 30

Bulan : Juni

Tahun : 2006

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

**HARDIMAN, S.H.**  
NIP 130808983

**ASMARA BUDI DYAH D.S., S.H.**  
NIP 130808987

Anggota Penguji,

1. **JAYUS, S.H., Mhum.** (.....)  
NIP 131287088
2. **IWAN RACHMAD S., S.H., Mhum.** (.....)  
NIP 132206014

## PENGESAHAN

Skripsi ini diterima oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada:

Hari : Jumat

Tanggal: 30 Juni 2006

Tempat : Fakultas Hukum

Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

**HARDIMAN, S.H.**

**NIP 130808983**

**ASMARA BUDI DYAH D.S., S.H.**

**NIP 130808987**

Anggota,

**JAYUS, S.H., Mhum.**

**NIP 131287088**

**IWAN RACHMAD S., S.H., Mhum.**

**NIP 132206014**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP 130808985**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “Studi Komparasi Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Berdasarkan UU.No. 22 Tahun 1999 dan UU.No. 32 Tahun 2004”. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Hardiman, S.H., M.Hum., selaku Ketua penguji, Asmara Budi Dyah D.S., S.H., selaku Sekretaris penguji, Jayus, S.H., Mhum, selaku Pembimbing, Iwan Rachmad S., S.H., Mhum., selaku pembantu pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;
3. Eddy Mulyono, S.H., Mhum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Seluruh Bapak/Ibu Salam, Bapak/Ibu Ayib dan Bapak/Ibu Siswanto sekeluarga yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Calon Isteriku Indriana yang telah membantuku dan memberikan dorongan;
6. Kawan-Kawan seperjuangan “Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia” dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih untuk kalian semua.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Jember, 10 Juni 2006

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>x</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.5 Metodologi Penulisan .....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>Bab II Fakta, Dasar Hukum dan Landasan Teori</b> .....	<b>8</b>
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum .....	10
2.3 Landasan Teori.....	10
2.3.1 Pengertian Desentralisasi .....	10
2.3.2 Pengertian Pemerintah Daerah.....	14
2.3.3 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	16
2.3.4 Pengertian Pemberhentian Kepala Daerah.....	24



<b>Bab III Pembahasan .....</b>	<b>33</b>
3.1 Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	33
3.1.1 Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999 .....	33
3.1.2 Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 .....	37
3.1.3 Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menurut PP No. 6 Tahun 2005.....	40
3.2 Pengaruh Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	42
3.2.1 Pengaruh Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999 .....	42
3.2.2 Pengaruh Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 .....	45
<b>Bab IV Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>50</b>
4.1. Kesimpulan .....	52
4.2. Saran .....	53

**Daftar Pustaka**

**Lampiran-lampiran**

## RINGKASAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah banyak sekali Kepala Daerah dalam hal ini bupati di berbagai wilayah Indonesia yang diberhentikan sementara dengan berbagai kasus, khususnya berkaitan dengan kasus-kasus korupsi.

Seiring dengan pemberlakuan pemberhentian sementara kepala daerah yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, dalam pelaksanaannya ternyata masih menyisakan polemik. Sehingga perlu adanya kajian yang cukup mendalam bagaimana lahirnya ketentuan tersebut, mengingat ternyata masih banyak pemberhentian sementara kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan komparasi dengan Undang-Undang sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas batasan ruang lingkup yang akan dibahas, dikhususkan tentang studi komparasi pemberhentian sementara kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, beserta pengaruh yang ditimbulkan bagi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundangan yang berlaku antara lain; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan Pemberhentian Sementara Kepala Daerah, kemudian bahan-bahan ini dianalisa secara kualitatif sehingga menghasilkan karya penulisan bersifat deskriptif kualitatif.

Kemudian dari latar belakang tersebut dirumuskan beberapa permasalahan yaitu : bagaimanakah tinjauan yuridis pemberhentian sementara kepala daerah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, serta Bagaimanakah pengaruh yang ditimbulkan akibat pemberhentian sementara Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan penulisan ini disamping untuk mengetahui mekanisme pemberhentian sementara kepala daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku, juga untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang ditimbulkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah..

Dalam pembahasan disebutkan bahwa pemberhentian sementara kepala daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, walaupun terdapat pandangan bahwa telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama menyangkut hak konstitusional seseorang.

## SUMMARY

Since the applying of the Law of No.32 year 2004 about Local Government, a lot of Regional Leader, in this case regent, in many parts of Indonesia region is laid-off with various cases, especially related to corruption cases.

Altogether with the application of regional leader lay-off that represents completeness of previous law which arranges about governance of area, in its real application, there still leave polemics. Thus, it need a deeper discussion in the way creating the law considering there are many Regional Leader lay-off is done by DPRD contrasted to the applied law comparing with the previous one.

Based on the explanations above, the scope of the discussed subject is especially emphasized on the comparative study about the Regional Leader concerning to Law no. 22 year 1999 and no. 32 year 2004, and the effect to governance.

This thesis writing uses normative juridical approach; the approach of main problem by studying and observing the rule of the Law, for instance, the Law no. 22 year 1999 and no. 32 year 2004 about Local Governance, and the related references, then all the material will be analyzed quantitatively so that the result is qualitative-descriptive.

Later from the settled background principles several problems; juridical observation about the Region Leader lay-off concerning to Law no. 22 year 1999 and no. 32 year 2004, and the caused effects to the governance.

The goal of the study is not only to understand the Region Leader lay-off mechanism, but also to know the caused effects to the governance.

In this discussion, is mentioned that the Region Leader lay-off concerning to Law no. 22 year 1999 and no. 32 year 2004 is enrolled by the applied Law, even though there are views that it seems contrasted to UUD'45, especially in personal constitutional rights.